



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**PROYEK PERUBAHAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II**

**SISTEM INFORMASI DATA BASE KECAMATAN BERBASIS WEB
DI KAWASAN PERBATASAN NEGARA**

Disusun oleh:

Nama : Dr. Drs. Andi Muhammad Yusuf, M.Si
NIP : 19730609 199311 1 002
Jabatan : Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan
Instansi : Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI
Kelas/Kelompok : A-1
Nomor Daftar Hadir : 32
Angkatan : XXVIII

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PROYEK PERUBAHAN

JUDUL : SISTEM INFORMASI DATA BASE KECAMATAN
BERBASIS WEB DI KAWASAN PERBATASAN NEGARA

NAMA : Dr. Drs. ANDI MUHAMMAD YUSUF, M.Si

NIP : 19730609 199311 1 002

PANGKAT/GOLONGAN : PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)

INSTANSI : BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

JABATAN : ASISTEN DEPUTI INFRASTRUKTUR PEMERINTAHAN

KELAS/KELOMPOK : A-1

NOMOR DAFTAR : 32

HADIR

Disetujui diseminarkan pada Seminar Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Tahun 2022 Angkatan XXVIII pada tanggal 7 Desember 2022 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.

Jakarta, 6 Desember 2022

Coach



Drs. Machmudan Sadik, M.Si
Widyaiswara Ahli Madya (IV/c)
NIP. 1971030519920210022

Mentor



Jeffry Apoly Rahawarin
Letnan Jenderal TNI (Purn) XVI
NIP. 196401212022211001

Mengetahui:

Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi
Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan



Mohammad Rizal, S.E., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196408171993031001

BERITA ACARA SEMINAR IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

Pada hari : Rabu
Tanggal : 7 Desember 2022
Pukul : 09:30 – 10:15 WIB
Tempat : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Dalam Negeri

Telah diseminarkan Implementasi Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Tahun 2022 Angkatan XXVIII

JUDUL : SISTEM INFORMASI DATA BASE KECAMATAN BERBASIS WEB DI KAWASAN PERBATASAN NEGARA.

DISUSUN OLEH : Dr. Drs. ANDI MUHAMMAD YUSUF, M.Si

JABATAN : ASISTEN DEPUTI INFRASTRUKTUR PEMERINTAHAN

KELAS/ KELOMPOK : A-1

NOMOR DAFTAR HADIR : 32

Dan telah mendapatkan pengujian/saran/masukan/komentar dari Penguji, *Mentor*, dan *Coach*.

Coach

Peserta



Drs. Machmudan Sadik, M.Si

Widyaiswara Ahli Madya (IV/c)

NIP. 1971030519920210022

Dr. Drs Andi Muhammad Yusuf, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19730609 199311 1 002

Penguji

Mentor



Dr. Rochayati Basra, M.Pd

Pembina Utama Madya (IV/d)

196710312001122001

Jeffry Apoly Rahawarin

Letnan Jenderal TNI (Purn) XVI

NIP. 196401212022211001

Mengetahui:

Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi
Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan



Mohammad Rizal, S.E., M.Si

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 196408171993031001

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT berkat rahmat taufiq dan hidayahNya sehingga penulis dapat mengimplementasikan dan menyampaikan Laporan Proyek Perubahan sesuai waktu yang telah ditentukan dengan judul: "SISTEM INFORMASI DATA BASE KECAMATAN BERBASIS WEB DI KAWASAN PERBATASAN NEGARA".

Laporan Proyek Perubahan ini diajukan sebagai syarat penilaian dalam rangka mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN II) yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia.

Pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan berbagai bantuan dan dorongan yaitu kepada:

1. Bapak Ir. Retuardy Daud, M.Sc, Sekretaris Utama BNPP atas pemberian ijinnya untuk mengikuti diklat PKN II.
2. Bapak Letjen TNI (Purn) Jeffry Apoly Rahawarin, Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan selaku Mentor yang telah memberikan bimbingan dan arahan.
3. Bapak Drs. Machmudan Sadik, M. Si selaku Coach yang telah memberikan bimbingan dan arahan.
4. Bapak Mohammad Rizal, S.E., M. Si selaku Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan, BPSDM, Kemendagri beserta seluruh karyawan/karyawatnya.
5. Para Pengajar, Widyaiswara dan Teman teman peserta PKN II Angkatan XXVIII Tahun 2022 yang telah memberikan pengarahan dan pengetahuan kepada penulis selama mengikuti PKN II.
6. Istri dan anak-anak tercinta, atas dorongan dan semangatnya. serta
7. Keluarga besar Badan Nasional Pengelola Perbatasan atas dukungan, kekompakan, dan kebersamaannya.

Kami menyadari bahwa Proyek Perubahan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, sumbang saran dan kritik yang bersifat membangun untuk penyempurnaan rancangan proyek perubahan ini sangat kami harapkan.

Jakarta, 6 Desember 2022

Peserta



Dr. Drs. Andi Muhammad Yusuf, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730609 199311 1 002

DAFTAR ISI

COVER.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN MENTOR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN COACH.....	iii
PRAKATA.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ix
BAB I RENCANA PROYEK PERUBAHAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
1. Urgensi.....	1
2. Penelitian Kepustakaan.....	5
3. Alur Pikir.....	6
B. TUJUAN DAN MANFAAT PROYEK PERUBAHAN.....	6
1. Tujuan.....	6
2. Manfaat.....	7
C. <i>OUTPUT</i> (KELUARAN) dan <i>OUTCOME</i> (HASIL).....	7
<i>Output</i> dan <i>Outcome</i>	7
D. TAHAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS.....	8
1. Analisa Lingkungan Strategis dengan SOAR.....	8
2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan (<i>milestone</i>).....	10
E. RENCANA STRATEGI <i>MARKETING</i>	14
1. Identifikasi <i>Stakeholder</i>	14
2. Jenis <i>Stakeholder</i>	14
3. Analisa <i>Stakeholder</i>	15
4. Strategi Komunikasi/ Mobilisasi <i>Stakeholder</i>	16
5. Strategi <i>Marketing</i> Proyek Perubahan.....	18
F. IDENTIFIKASI POTENSI KENDALA DAN SOLUSINYA.....	19
1. Identifikasi Kendala dan Masalah.....	19
2. Resiko Yang Harus diantisipasi.....	19
3. Mengatasi Kendala.....	19
G. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN PROYEK PERUBAHAN.....	19
H. TATA KELOLA PROYEK PERUBAHAN.....	20
1. Pembentukan Tim Kerja.....	20
2. Struktur Organisasi Pelaksana dan Tim Efektif.....	22
3. Struktur Tata Kelola Proyek Perubahan.....	22
4. Tugas dan Kewenangan Tim Efektif.....	23
5. Masa Berlaku dan Etika serta Mekanisme Tim Efektif.....	24
6. Monitoring dan Evaluasi.....	24

I. RENCANA PENGEMBANGAN POTENSI DIRI SEBAGAI TINDAKLANJUT DARI SELF ASSESMENT DIRI	25
BAB II PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN	28
A. CAPAIAN TAHAPAN RENCANA STRATEGIS.....	28
1. Capaian Rencana Jangka Pendek	28
2. Pelaksanaan Capaian Jangka Pendek	29
a. Pembentukan Tim Efektif dan Penyusunan Instrumen.....	29
b. Terpenuhinya Dukungan dari <i>Stakeholder</i> Internal dan Eksternal.....	31
c. Rapat Eksternal bersama Kementerian/Lembaga	32
d. Pembahasan dan Penginputan Instrument kedalam Sistem Informasi Data Base Kecamatan Berbasis WEB	33
e. Melaksanakan <i>Virtual Meeting</i> bersama Kecamatan.....	34
f. Melaksanakan Evaluasi Sistem Informasi Data Base berbasis WEB ...	35
3. Hasil Pelaksanaan Rencana Jangka Pendek	36
B. IMPLEMENTASI STRATEGI MARKETING	36
1. Strategi Komunikasi	36
2. Strategi Marketing Hasil Proyek Perubahan	37
C. PEMBERDAYAAN ORGANISASI PEMBELAJARAN	38
BAB III PENUTUP	40
A. LESSONT LEARNED	40
B. KESIMPULAN	40
C. SARAN/REKOMENDASI.....	41
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Analisa Faktor Penyebab Fishbone Diagram	4
Gambar 2. Alur Pikir Strategi	7
Gambar 3. Pemetaan <i>Stakeholder</i>	16
Gambar 4. SOTK Tim Efektif	23
Gambar 5. Struktur Tata Kelola Proyek Perubahan	23

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Analisa <i>USG</i>	3
Tabel 2. Matriks SWOT	5
Tabel 3 Analisis SOAR	10
Tabel 4. Rencana Tahapan Jangka Pendek	11
Tabel 5. Rencana Tahapan Jangka Menengah	12
Tabel 6. Rencana Tahapan Jangka Panjang	14
Tabel 7. Daftar <i>Stakeholder</i>	15
Tabel 8. Peta Strategi Komunikasi.....	18
Tabel 9. Strategi Komunikasi <i>Stakeholder</i>	18
Tabel 10. Identifikasi Potensi Kendala Solusinya.....	20
Tabel 11. Daftar Nama dan Tugas Tim Kerja.....	22
Tabel 12. Ringkasan Pelaksanaan dan Capaian Proyek Perubahan	28
Tabel 13. Peta Strategi Komunikasi dalam Implementasi Pelaksanaan Target Kegiatan Proker	37

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sistem Informasi base data kecamatan berbasis Web di kawasan perbatasan negara memiliki peran sentral dan dapat menjadi jembatan antara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Kementerian/Lembaga teknis khususnya pembangunan di kawasan perbatasan mengingat BNPP selaku Sekretariat Tetap (Settap) pembangunan kawasan perbatasan. Saat ini pemerintah pusat terus membangun kawasan perbatasan diperkuat dengan arahan Bapak Presiden Jokowi melalui Nawacita ke 3 namun implementasinya alokasi anggaran yang besar tidak diiringi pembangunan yang tepat di kawasan perbatasan sehingga harapan Bapak Presiden untuk bersaing dengan negara tetangga tidak dapat terealisasi dengan baik.

Dengan adanya sistem informasi base data kecamatan berbasis Web pembangunan sarana prasarana pemerintahan melalui proses integrasi data dapat terlaksana sehingga intervensi pembangunan dapat terjalin dan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masing-masing kecamatan serta sebagai bentuk komitmen pemerintah hadir di masyarakat tanpa adanya perbedaan baik di perbatasan negara dan non perbatasan negara. Selain itu bentuk penerapan teknologi yang berdampak pada efisiensi dan efektif mengingat dalam hal pemerintah daerah menghemat *cost* perjalanan dinas untuk melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat melalui sebuah sistem yang telah di bangun bersama .

Untuk memaksimalkan penggunaan sistem tersebut diperlukan peran stakeholder dan tim untuk melakukan sosialisasi dan instrument-instrument yang dianggap relevan sehingga camat lokasi prioritas (Lopri) dapat menggambarkan daerah – daerah yang memerlukan penanganan segera. Selain itu telah dilakukan ujicoba dengan 5 Kecamatan Lokasi Prioritas untuk mengetahui yang menjadi masukan dari masing-masing kecamatan sehingga pada saat dilaksanakan target milestone jangka menengah dan panjang tidak di temui masalah berarti dan kedepannya sistem ini dapat di akses tidak hanya melalui web namun berbasis android dan ios yang dimana tujuannya untuk *Good Governance* diinstitusi ini.

BAB I

RENCANA PROYEK PERUBAHAN

A. LATAR BELAKANG

1. Urgensi

Kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis dalam menjaga integritas wilayah negara yang memerlukan pengelolaan secara khusus. Pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan diperlukan untuk memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup wilayah negara, dan hak-hak berdaulat, serta dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan, keamanan dan kelestarian lingkungan secara bersama sama (Renstra Settap BNPP, 2020).

Kebijakan pembangunan kawasan perbatasan telah dijabarkan dalam beberapa Undang-Undang dan Peraturan, antara lain (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) 2005- 2025, (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Kawasan Perbatasan saat ini telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional dari sudut pandang pertahanan dan keamanan. (3) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menetapkan kawasan perbatasan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN).

Untuk mengimplementasikan kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan dari sisi kelembagaan, sesuai amanat UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, telah dibentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Pembentukan BNPP melalui Perpres dimaksud agar pengelolaan perbatasan lebih fokus, sinkron, terkoordinasi, dan berada pada satu pintu pengelolaan. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala BNPP dibantu oleh Sekretariat Tetap (Settap) BNPP dalam hal dukungan teknis, koordinatif dan administratif.

Hal ini sejalan dengan program prioritas pemerintah melalui Nawacita ke 3 membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang relatif besar untuk mewujudkan Nawacita ke-3 sebagai upaya meningkatkan daya saing nasional, pemerataan hasil pembangunan, serta mengurangi disparitas, khususnya di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).

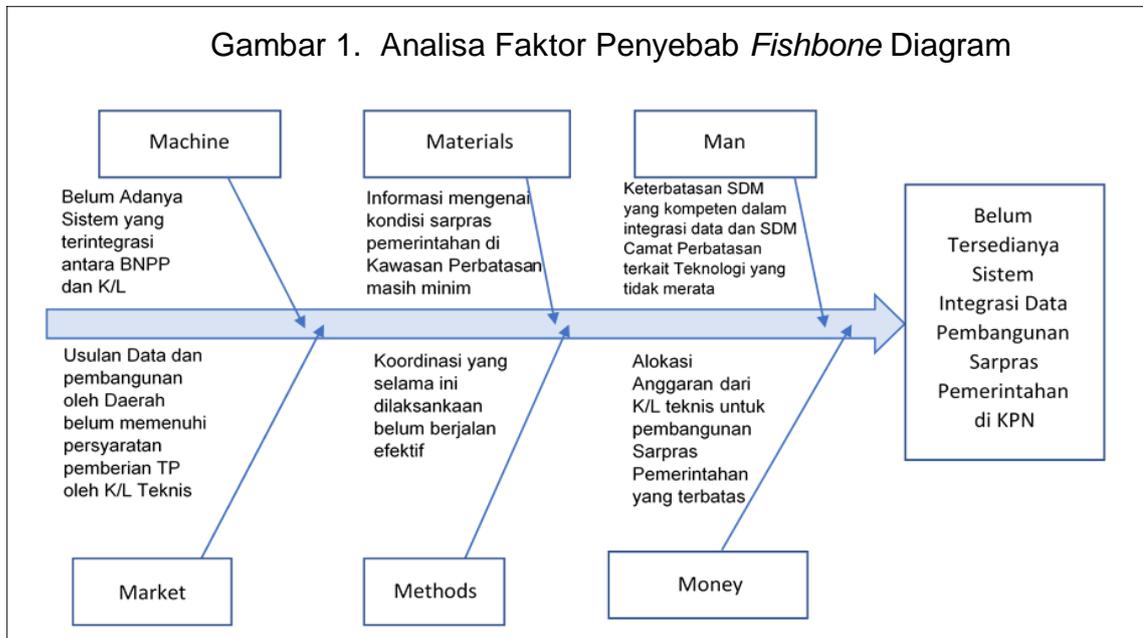
Dengan alokasi anggaran yang relatif besar dari Pemerintah Pusat, pada kenyataannya isu-isu pembangunan kawasan perbatasan khususnya pada aspek sosial dan kualitas sarana prasarana pelayanan pemerintahan yang minim, memunculkan kesan kurangnya pendekatan pembangunan yang lebih dominan pada aspek *security* dibanding *prosperity* dimana kita ketahui alokasi anggaran di kawasan perbatasan tergolong rendah khususnya dalam pemenuhan sarana dan prasarana pemerintahan.

Dengan beberapa kondisi permasalahan yang ada selanjutnya dilakukan analisis *urgency, seriousness, growth (USG)*:

Tabel 1. Analisis USG

NO	MASALAH	NILAI USG			SKOR	RANKING
		<i>U</i>	<i>S</i>	<i>G</i>		
1.	Alokasi anggaran yang relatif besar tidak diiringi dengan hasil pembangunan	5	4	5	11	I
2.	Pengelolaan perbatasan negara belum sinkron dan terkoordinasi dengan baik	4	4	3	14	II
3.	Pendekatan pembangunan yang lebih dominan pada aspek <i>security</i> dibanding <i>prosperity</i>	3	4	5	12	II

Dari identifikasi masalah tersebut, dimana terdapat 1 (satu) masalah utama yang penting dan mendesak yang perlu segera ditangani yang jika tidak tangani segera akan berdampak serius. Isu tersebut adalah alokasi anggaran yang relatif besar tidak diiringi dengan hasil pembangunan. Untuk mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari isu ini, selanjutnya dilakukan analisis penyebab dengan menggunakan metode fishbone diagram.



Dari diagram di atas bahwa akar masalah dari “Belum tersedianya sistem integrasi data pembangunan sarpras pemerintahan di kawasan perbatasan negara disebabkan oleh beberapa faktor. Setelah diketahui penyebab masalah di atas, selanjutnya untuk menentukan strategi penyelesaian masalah digunakan analisis SWOT:

a. *Strengths* (Kekuatan)

Tugas Badan Nasional Pengelola dalam pengelolaan perbatasan negara selaku Sekretariat Tetap (Settap) menentukan arah pembangunan di kawasan perbatasan negara lebih fokus, sinkron, terkoordinasi, dan berada pada satu pintu pengelolaan (integrasi).

b. *Weaknesses* (Kelemahan)

Metode Koordinasi yang selama ini dilaksanakan belum berjalan efektif sehingga berpengaruh terhadap hasil koordinasi dalam hal ini rencana pembangunan.

c. *Opportunities* (Peluang)

- 1) Usulan Data dan pembangunan oleh Daerah belum memenuhi persyaratan pemberian TP oleh K/L Teknis.
- 2) Informasi kondisi sarana prasarana pemerintahan di Kawasan Perbatasan masih minim.
- 3) Belum adanya sistem intergrasi data antara BNPP selaku lembaga koordinasi dan K/L.

d. *Threats* (Ancaman)

- 1) Keterbatasan SDM yang kompeten dalam integrasi data.
- 2) SDM Camat Perbatasan terkait Teknologi yang tidak merata.

Setelah dilakukan analisis dari masing-masing SWOT, maka selanjutnya akan dilakukan penganalisisan menggunakan tabel matriks SWOT untuk mengetahui strategi-strategi apa yang akan dilakukan berdasarkan dari kekuatan, peluang serta ancaman yang ada.

Tabel 2. Matriks SWOT

	Strenghts (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)
Opportunities (Peluang)	SO Melakukan pertemuan yang intens dan terkoordinasi dengan baik bersama K/l teknis dengan disertai bahan masukan berupa data-data dan usulan yang telah sesuai dengan kebutuhan intervensi masing-masing daerah	WO Melakukan konsolidasi BNPP, K/L teknis, Pemerintah Daerah dan Bappenas dengan menampilkan sistem informasi mengenai kondisi kawasan perbatasan sehingga masing-masing <i>stakeholder</i> mengetahui <i>jobdesk</i> masing-masing
Threats (Ancaman)	ST Untuk meningkatkan kualitas SDM dilakukan peningkatan kapasitas bagi aparatur melalui Diklat dan Bimtek	WT Memperbarui pola-pola koordinasi melalui sistem informasi yg telah dibuat mendorong Aparatur lebih <i>care</i> atas daerahnya masing-masing dengan sungguh-sungguh menginput data yang valid untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Pusat.

2. Penelitian Kepustakaan

Adapun proyek perubahan yang akan disusun lebih kepada studi literatur dimana dengan melakukan pengumpulan data/referensi yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti sebagai rujukan dalam penelitian sehingga diketahui jalan keluar dari permasalahan yang ada.

Dalam proyek perubahan ini, adapun metodologi penelitian menggunakan penelitian sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian menggunakan metode deskriptif.

b. *Setting* Penelitian

Penelitian dilakukan melalui sistem informasi dengan *pilot project* 5 (lima) kecamatan lokasi prioritas (Lokpri) yang dianggap representasi dari kawasan perbatasan negara. Adapun waktu penelitian dilaksanakan dengan skema jangka pendek (hingga PKN 2 berakhir), jangka menengah (6 Bulan Setelah PKN) di 222 Kecamatan Lokpri), dan Jangka Panjang (1 Tahun) di 564 Kecamatan Perbatasan.

c. Sumber Data

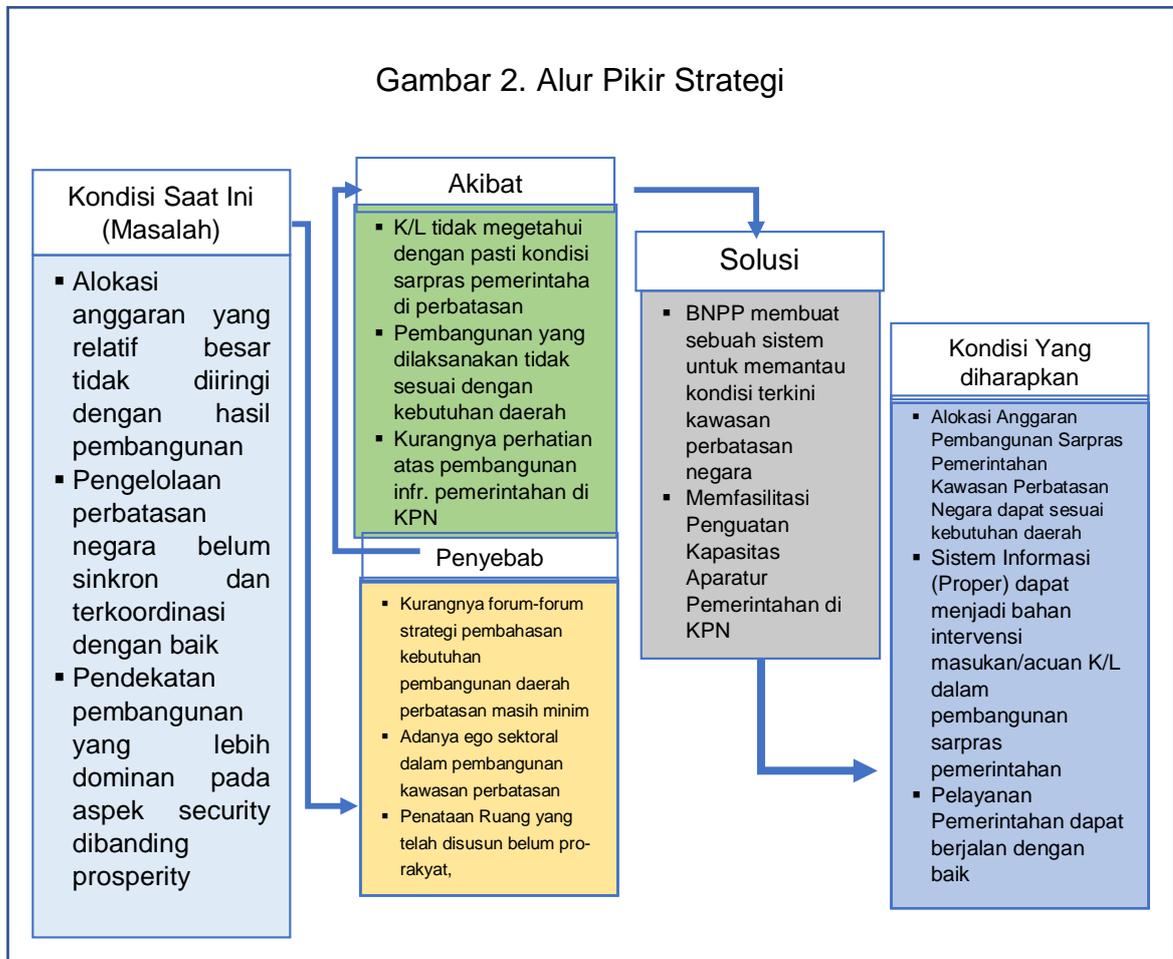
- 1) Renstra Settap BNPP 2020-2024; dan
- 2) Jurnal/Literatur Terkait.

d. Teknik Analisis Data

- 1) Merumuskan Pernyataan Penelitian;
- 2) Tujuan dan Definisi Operasional;
- 3) Populasi dan Subjek Studi;
- 4) Cara Pengambilan Studi;
- 5) Cara Pengambilan Sampel;
- 6) Menentukan Variabel;
- 7) Pengumpulan Data;
- 8) Pengolahan Data; dan
- 9) Analisis Data.

3. Alur Pikir

Judul: Strategi Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan Melalui Sistem Informasi di Kawasan Perbatasan Negara.



B. TUJUAN DAN MANFAAT PROYEK PERUBAHAN

1. Tujuan

a. Jangka Pendek

Tujuan jangka pendek akan dicapai dalam waktu 3 (tiga) bulan selama PKN 2 yaitu, mulai September s.d Desember 2022 dengan ketersediaan data di 5 Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) yang telah diinput oleh Kecamatan Perbatasan kedalam Si-Pintas.

b. Jangka Menengah

Tujuan jangka menengah: dapat dilaksanakan di seluruh kecamatan Lokasi Prioritas 222 Kawasan Perbatasan dan melaksanakan sosialisasi bersama

Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Adwil), serta melakukan integrasi data.

c. Jangka Panjang

Tujuan Jangka Panjang: diharapkan 564 kecamatan perbatasan negara dapat melakukan pengisian instrument data untuk dilakukan integrasi data bersama Ditjen Bina Adwil sebagai bahan masukan pembangunan sarana prasarana pemerintahan di kawasan perbatasan *inline* dan sesuai dengan kebutuhan intervensi daerah.

2. Manfaat

Berdasarkan tujuan proyek perubahan yang telah dijelaskan di atas maka yang ingin dicapai dari Si-Pintas ini adalah, sebagai berikut:

a. Internal

- 1) Dalam melakukan pengukuran data yang *up to date* dan akurat mengingat langsung diinput oleh para Camat.
- 2) Efisien dan Efektif data dibutuhkan dan dimanfaatkan sewaktu-waktu.

b. Eksternal

- 1) Bagi Pemerintah Daerah menghemat dari sisi anggaran perjalanan dinas.
- 2) Menghemat penggunaan kertas dan memahami pembangunan yang akan diintervensi oleh pemerintah pusat di daerahnya masing-masing.

C. OUTPUT (Keluaran) dan OUTCOME (Hasil)

Output dan Outcome

Output dari Proyek Perubahan ini adalah terdapat sebuah sistem informasi berbasis Web dan telah dilakukan penginputan data di 5 (lima) kecamatan lokasi prioritas (Lokpri) yang menjadi *pilot project*.

Sedangkan *Outcome* dengan adanya sistem informasi tersebut dapat menjadi bahan masukan/acuan bagi Kementerian/Lembaga dalam melakukan intervensi pembangunan khususnya sarana prasarana pemerintahan di 222 Kecamatan Lokasi Prioritas Tahun 2020-2024 dan 564 kecamatan kawasan perbatasan negara.

D. TAHAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

1. Analisa Lingkungan Strategis

Adapun analisis SOAR terhadap lingkungan strategis terbagi menjadi 4 kondisi sebagai berikut:

a. *Strength* (Kekuatan):

- 1) Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) merupakan lembaga yang dibentuk dengan tugas sebagai Sekretariat Tetap (Settap) Pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara.
- 2) Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) berdasarkan Perpres No.44/2017 dimana struktur keanggotaan terdiri dari Ketua Pengarah Menko Polhukam, Wakil Ketua Pengarah I, II, III 3 Menko, Kepala BNPP Mendagri dan 27 K/L, 15 Provinsi Perbatasan dan 54 Kabupaten/Kota Perbatasan.

b. *Oppurtunities* (Peluang)

Dengan struktur keanggotaan yang dimiliki, melalui Si-Pintas pengelolaan infrastruktur di kawasan perbatasan negara dalam pemenuhan sarana prasarana pemerintahan di kawasan perbatasan dapat menjadi bahan masukan K/L teknis dalam pembangunan.

c. *Aspirations* (Harapan)

- 1) Efektivitas pengelolaan infrastruktur pemerintahan di kawasan perbatasan negara; dan
- 2) Efisiensi dalam hal anggaran.

d. *Result* (Hasil)

Menjadi acuan/ bahan masukan K/L teknis khususnya pembangunan sarana prasarana pemerintahan di kawasan perbatasan negara.

Tabel 3. Analisis SOAR

Internal Eksternal	<i>Strength</i> (Kekuatan Internal)	<i>Opportunities</i> (Peluang Eksternal)
<i>Aspiration</i> (Harapan)	Strategi SA Mendorong Kemendagri (Ditjen Bina Adwil) membangun sesuai dengan sistem informasi Si-Pintas	Strategi OA Data yang diinput oleh camat kedalam Si-Pintas <i>inline</i> dengan kebutuhan yang telah diserahkan ke Bappeda kabupaten sehingga tidak terjadi perubahan peruntukan anggaran
<i>Result</i> (Hasil)	Strategi SR Melakukan intervensi pembangunan di daerah perbatasan negara sesuai kategori super prioritas dan prioritas	Strategi OR Dengan keterbatasan fiskal negara tidak menutup kemungkinan dengan data yang telah tersedia dan akurat dilakukan alternative pembangunan menggunakan Non APBN.

2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan (*Milestone*)

Rencana tahapan terbagi dalam *time-frame* yang telah ditentukan dan disesuaikan dengan *output* kunci yang akan dicapai sesuai tujuan proyek perubahan. Didalam tahapan rencana strategis ini juga dijelaskan tentang *output/* capaian yang dihasilkan dalam setiap tahapan yaitu tahapan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Tahapan pelaksanaan proyek perubahan dapat berisi informasi sebagai berikut:

- a. Jenis kegiatan;
- b. siapa melakukan kegiatannya;
- c. target waktu penyelesaian kegiatan;
- d. kapan kegiatan dimulai dan selesai; dan
- e. Output Kegiatan.

Tabel 4. Rencana Tahapan Jangka Pendek
(Minggu IV September s/d Minggu II Desember 2022)

NO	TAHAPAN DAN KEGIATAN	WAKTU KEGIATAN	OUTPUT	STAKEHOLDER YANG TERLIBAT	PROJECT LEADER
1.	Pembentukan Tim Efektif dan Penyusunan Instrumen				
	a. Penyusunan ST b. Pembahasan ST c. Penandatanganan ST d. Rapat Internal Tim e. Penyusunan Instrument f. Pembahasan Instrument	Minggu IV September 2022	a. ST Tim b. Notulensi Rapat c. Membuat Timeline Kegiatan	<i>Project Leader</i>	a. Memetakan pekerjaan sesuai kompetensi staf b. Membuat dan menentukan manajemen Waktu
2.	Melaksanakan Rapat Eksternal bersama Kementerian/Lembaga				
	a. Koordinasi dan Konsolidasi b. Menentukan Lokasi <i>Pilot Project</i>	Minggu IV September 2022	a. Notulensi b. Absen	a. Mentor b. Project Leader	a. Memaparkan Ide Proyek Perubahan b. Pentingnya Sistem Informasi Base Data berbasis WEB
3.	Pembahasan dan Penginputan Instrument Sistem Informasi Database Kecamatan Berbasis WEB				
	a. Menginput Instrument b. Ujicoba Sistem	Minggu IV Oktober 2022	<i>Database</i>	a. Tim Efektif b. Project Leader	Memberikan Masukan Format Database
4.	Melaksanakan Virtual Meeting bersama Kecamatan				
	a. Sosialisasi Sistem Informasi b. Tata Cara Penginputan c. Penginputan d. Evaluasi	Minggu V Oktober 2022	a. Data Base b. Sistem Informasi	a. Project Leader b. Tim Efektif c. Camat	
5.	Melakukan Evaluasi Sistem Informasi Basedata berbasis WEB				

NO	TAHAPAN DAN KEGIATAN	WAKTU KEGIATAN	OUTPUT	STAKEHOLDER YANG TERLIBAT	PROJECT LEADER
	a. Masukan dari Kecamatan terkait Si-Pintas b. Koordinasi Hasil dari Si-Pintas	Minggu IV- V November 2022	Dokumen dalam bentuk kebutuhan masing-masing daerah	a. Project Leader b. Tim Efektif	a. Memint Camat yang telah menginput untuk memberi masukan b. Menindak lanjuti dengan bentuk koordinasi dengan K/L Teknis

Tabel 5. Rencana Tahapan Jangka Menengah
(Minggu IV Desember s/d Minggu IV Mei 2023)

NO	TAHAPAN DAN KEGIATAN	WAKTU KEGIATAN	OUTPUT	STAKEHOLDER YANG TERLIBAT	PROJECT LEADER
1.	Melakukan Evaluasi Si-Pintas dan Penyempurnaan Jangka Pendek				
	Penyempurnaan dan Implementasi Si-Pintas	Minggu IV Desember 2022	Laporan Kegiatan	a. <i>Project Leader</i> b. Tim Efektif	Memberikan Masukan Format Data Base dan Sistem Infomasi
2.	Melaksanakan Sosialisasi Eksternal bersama Mitra K/L				
	a. Menampilkan Pemetaan 5 Kec. Lokpri yang menjadi Pilot Project b. Sosialisasi Integrasi Data	Minggu II Januari 2023	a. Notulen Rapat b. Masukan Dari K/L	a. Mentor b. <i>Team Leader</i> c. K/L Teknis	a. Menjelaskan Pentingnya Si-Pintas b. Hasil Pemetaan Si-Pintas dan Tata cara pengurutannya sehingga diketahui super prioritas, prioritas dan Mandiri
3.	Pemetaan Data Sistem				

NO	TAHAPAN DAN KEGIATAN	WAKTU KEGIATAN	OUTPUT	STAKEHOLDER YANG TERLIBAT	PROJECT LEADER
	Mengembangkan Sistem Informasi untuk seluruh Lokasi Prioritas Tahun 2020-2024 di Kawasan Perbatasan Negara	Minggu II Maret 2023	Data Base	a. Project Leader b. Tim Efektif	
4.	Melaksanakan Virtual Meeting bersama Kecamatan				
	a. Sosialisasi Sistem Informasi b. Tata Cara Penginputan c. Penginputan d. Evaluasi	Minggu V Oktober 2022	Data Base Sistem Informasi	a. Project Leader b. Tim Efektif c. 217 Camat Lokpri	
5.	Penyampaian Bahan Masukan ke K/ L Mitra				
	Berkoordinasi dengan Mitra K/L	Minggu IV Maret 2023	Notulensi	Project Leader	Memberikan Masukan Pembangunan khususnya di Kawasan Perbatasan
6.	Sosialisasi Data				
	a. Pertemuan Langsung dalam satu forum b. Menjelaskan langkah-langkah yang telah dilakukan dengan data yang telah diinput	Minggu II April 2023	a. Masukan dari Daerah b. Instrumen yang perlu ditambahkan	a. Mentor b. Project Leader c. Internal Asdep Infrastruktur Pemerintahan	a. Menginisiasi Kegiatan b. Menjelaskan pentingnya data
7.	Monitoring dan Evaluasi				
	Kompilasi data dan Justifikasi	Minggu III Mei 2023	Laporan Hasil Monev	Tim Efektif	

Tabel 6. Rencana Tahapan Jangka Panjang
(Minggu IV Mei 2023 s/d Minggu IV Mei 2024)

NO	TAHAPAN DAN KEGIATAN	WAKTU KEGIATAN	OUTPUT	STAKEHOLDER YANG TERLIBAT	PROJECT LEADER
1.	Evaluasi Si-Pintas Jangka Pendek dan Menengah				
	a. Mengidentifikasi Permasalahan b. Menganalisa Penyebab c. Melakukan Pengembangan	Minggu I Juni 2023	Laporan Progres	a. Mentor b. Tim IT	Memberikan arahan dan bimbingan kepada Tim Efektif
2.	Pelaksanaan Pelatihan				
	Melakukan Koordinasi Internal	Minggu II Juli 2023	List Peserta dan Jadwal	Project Leader	Melaporkan Progres kepada Mentor
3.	Melakukan <i>Share</i> Akun Login dan Peningkatan				
	a. Menyampaikan kebersediaan untuk melakukan login kedalam Si-Pintas melalui Media Chat Online b. Menyampaikan Tata Cara Login dan Peningkatan	Minggu V Oktober 2023	a. Bukti Chat b. Hasil Peningkatan	Tim Efektif	a. Memberikan Arahan b. Menjelaskan Maksud dari adanya Si-Pintas
4.	Melanjutkan Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem				
	a. Mengupdate data dan informasi b. Mensinkronkan dengan Data di K/L Teknis	Minggu II Januari 2024	Kesepakatan bersama K/L Teknis dalam bentuk berita acara	a. <i>Project Leader</i> b. Tim Efektif	a. Memberikan arahan dan bimbingan kepada staf b. Memantau perkembangan/ progress dan

NO	TAHAPAN DAN KEGIATAN	WAKTU KEGIATAN	OUTPUT	STAKEHOLDER YANG TERLIBAT	PROJECT LEADER
					Updating Data
5.	Evaluasi Si-Pintas				
	a. Meng-update data dan informasi sistem b. Sinkronisasi data dengan	Minggu I Mei 2024	Notulen Rapat	a. <i>Project Leader</i> b. Tim IT c. Tim Efektif	a. Membangun koordinasi dengan stakeholder Internal dan eksternal b. Meyakinkan kepada stakeholder untuk mendapatkan dukungan

E. RENCANA STRATEGI MARKETING

1. Identifikasi *Stakeholder*

Identifikasi *Stakeholder* adalah identifikasi instansi/individu yang berkepentingan dan memiliki pengaruh terhadap proyek perubahan. Pengaruh tersebut dapat bersifat positif yang berarti mendukung, negatif yaitu menjadi sumber penghambat, atau netral yaitu pengaruhnya tidak mendukung dan menghambat proyek perubahan. *Stakeholder* yang akan terlibat dalam proyek perubahan ini terdiri dari *stakeholder* internal di lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Eksternal Kementerian/Lembaga serta Daerah.

2. Jenis *Stakeholder*

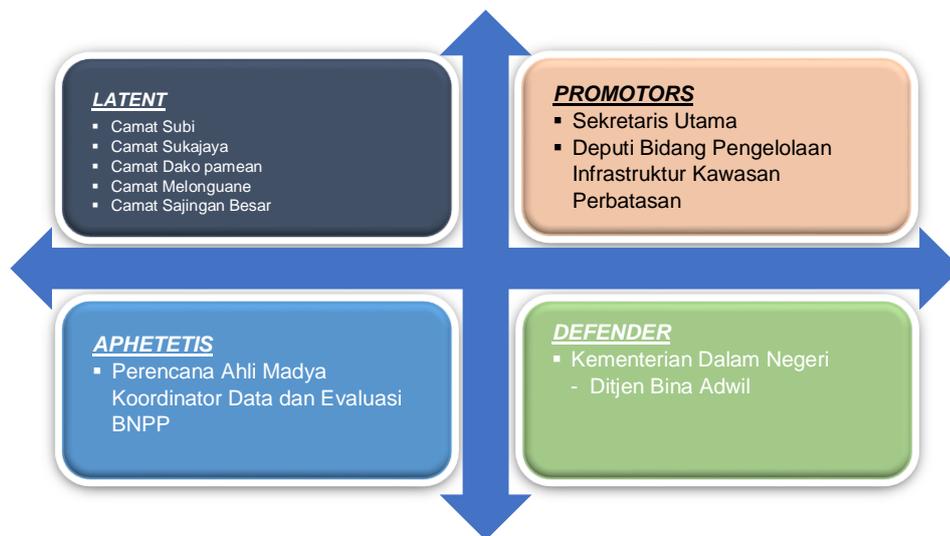
Tabel 7. Daftar *Stakeholder*

NO	STAKEHOLDER INTERNAL	STAKEHOLDER EKSTERNAL
1.	Sekretaris Utama BNPP	Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Adwil)
2.	Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, BNPP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Camat Subi ▪ Camat Sukajaya ▪ Camat Dako pamean ▪ Camat Melonguane ▪ Camat Sajingan Besar
3.	Bagian Data dan Evaluasi, BNPP	

3. Analisa Stakeholder

Setelah mengidentifikasi *stakeholder* yang mempengaruhi proyek perubahan ini, selanjutnya dilakukan analisis terhadap pengaruh *stakeholder* untuk tercapainya keberhasilan proyek perubahan ini. Analisis stakeholder menggunakan analisis *tingkat pengaruh (Influence/power)*, dan *tingkat minat (interest) stakeholder* tersebut terhadap proyek perubahan yang akan dilakukan. Adapun stakeholder tersebut hasil tersebut dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

Pemetaan *Stakeholder* Proyek Perubahan
Gambar 3. Pemetaan *Stakeholder*



a. *Promotors*

Promotors adalah *stakeholder* yang memiliki kepentingan tinggi dan pengaruh tinggi/besar terhadap proyek perubahan. Stakeholder yang masuk dalam kuadran ini adalah: Sekretaris Utama, BNPP dan Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, BNPP.

Para Stakeholder di atas memberikan dukungan langsung baik secara teknis maupun kebijakan, sehingga tanpa adanya dukungan pihak stakeholder tersebut proyek perubahan ini dipastikan tidak dapat dilaksanakan.

b. *Defender*

Stakeholder pada kuadran ini tergolong memiliki kepentingan tinggi, tetapi pengaruh rendah. *Stakeholder* yang masuk dalam kuadran ini adalah K/L Mitra BNPP, Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Adwil).

Stakeholder di atas adalah calon pengguna produk perubahan dan tidak memberikan dukungan secara langsung, namun saran dan masukan dari *stakeholder* ini juga sangat membantu.

c. *Aphetetis*

Pada kuadran ini Perencana Ahli Madya koordinator Data dan Evaluasi, BNPP, sebagai *stakeholder* yang kurang memiliki pengaruh dan kepentingan. *Stakeholder* di atas tidak terkait dalam proses penyusunan Si-Pintas, tetapi *stakeholder* ini memberikan masukan-masukan informasi tentang sistem yang telah ada sebelumnya sebagai pembanding dalam penyusunan proyek perubahan.

d. *Latent*

Tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam proyek perubahan, tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi proyek perubahan jika mereka menjadi tertarik dengan melakukan input data. *Stakeholder* yang masuk dalam kuadran ini adalah Camat.

4. Strategi Komunikasi/ Mobilisasi *Stakeholder*

Untuk menghadapi setiap jenis *stakeholder* di atas, digunakan strategi komunikasi sebagai berikut:

Tabel 8. Peta Strategi Komunikasi

KEEP SATISFIED	MANAGE CLOSELY
Strategi komunikasi yang digunakan adalah untuk meningkatkan pengaruh <i>stakeholders</i> agar mendukung proyek perubahan yaitu dengan konsultasi dan diskusi.	Strategi komunikasi yang digunakan adalah yang akan meningkatkan dukungan dan minat promotors terhadap proyek perubahan ini (<i>closely managed strategy</i>), diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Konsultasi; ▪ Diskusi secara reguler; ▪ Memantau progres kegiatan dan mengidentifikasi hambatan terhadap proyek perubahan.
MINIMAL EFFORT	KEEP INFORMED
Strategi komunikasi yang digunakan adalah untuk meningkatkan dukungan <i>stakeholder</i> ini agar mendukung proyek perubahan yaitu dengan, saling sharing.	Strategi komunikasi yang digunakan adalah untuk meningkatkan minat <i>stakeholder</i> terhadap proyek perubahan yaitu dengan konsultasi dan diskusi penerapan Si-Pintas.

Adapun strategi komunikasi berdasarkan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Strategi Komunikasi *Stakeholders*

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	EKSPETASI	STRATEGI KOMUNIKASI
1.	Sekretaris BNPP	Meminta Pentunjuk dan dukungan mengenai arah Proyek Perubahan	Menerima arahan dan petunjuk
2.	Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan	Menerima Petunjuk dan Dukungan terhadap arah pembangunan di kawasan perbatasan	Diskusi terkait Konsep Proyek Perubahan
3.	K/L Teknis	Memberikan Masukan mengenai Instrument Pembangunan di Kawasan Perbatasan	Koordinasi
4.	Bagian Data dan Informasi BNPP	Memberikan dukungan dan masukan terkait data-data proyek perubahan sebelumnya	Koordinasi

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	EKSPETASI	STRATEGI KOMUNIKASI
5.	Camat Lokasi Prioritas	Melakukan Input Data secara maksimal dan sesuai dengan kondisi <i>real</i>	Memberikan Petunjuk Teknis Penginputan sesuai Instrument yang diberikan melalui <i>Virtual Meeting</i>

5. Strategi Marketing Proyek Perubahan

Strategi marketing terhadap hasil proyek perubahan dilakukan dengan memperhatikan elemen dalam pemasaran sektor publik, yaitu 4P1C (*Product, Price, Promotion, Place* dan *Customer*).

a. *Product*

Product yang dihasilkan dari proyek perubahan ini adalah Strategi Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan melalui Sistem Informasi di Kawasan Perbatasan Negara.

b. *Price*

Price ditekankan aspek efisiensi dan efektivitas dari proyek perubahan ini, baik dari sisi waktu, biaya, tenaga dan tingkat akurasi data capaian kinerja, serta dari sisi manfaat, layanan administrasi ini meningkatkan penggunaan teknologi informasi, penghematan belanja kertas dan beban perjalanan dinas dari perbatasan negara ke Jakarta.

c. *Promotion*

Strategi komunikasi yang digunakan dalam proyek perubahan ini melalui Diskusi dan sosialisasi serta koordinasi ke daerah melalui *virtual meeting* mengingat waktu untuk meningkatkan sinergitas dan dukungan berupa bimbingan dan arahan oleh pembuat kebijakan.

d. *Place*

Proyek perubahan ini dilaksanakan Kedeputian Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan pada Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan, yang dimulai sejak minggu IV September 2022 dengan cara kerja atau prosedur kerja dimulai berbasis *web (online)*.

e. *Customer*

Sasaran utama sebagai *customer* untuk menggunakan produk ini adalah Kecamatan Lokasi Prioritas dan Kecamatan Perbatasan Negara.

F. IDENTIFIKASI POTENSI KENDALA DAN SOLUSINYA

Dalam mengidentifikasi sebuah masalah dilakukan pendekatan:

Tabel 10. Pemetaan Identifikasi Potensi Kendala dan Solusinya

Kendala dan Masalah	Antisipasi Resiko	Mengatasi Kendala
Kendala Teknis		
Keterbatasan waktu penyelesaian proyek proper	Membuat Timeline	Meng-optimalkan waktu yang tersedia dalam menyelesaikan proyek perubahan, dengan menjadwalkan setiap kegiatan dengan baik.
SDM Aparatur Kecamatan dalam menginput Data terbatas.	Melakukan pemetaan terhadap ASN yang belum mahir	Memberikan Petunjuk Peningkatan dan Dibuka Sesi mengenai Tata Cara Peningkatan apabila masih terdapat kecamatan yang belum cara penginputannya
Kendala Subtansi		
Camat di Lokasi Prioritas Kawasan Perbatasan Negara tidak dapat menterjemahkan hal-hal apa saja yang telah ditentukan	Membuat juknis terkait Si-Pintas	Memberikan pengetahuan dan bimbingan teknis singkat hal apa saja yang ada dalam <i>instrument</i> big data tersebut
Data/ informasi yang telah diinput tidak lengkap sehingga tidak dapat dilakukan pengurutan pembangunan	Membuat juknis terkait Si-Pintas	Saat <i>virtual meeting</i> berlangsung dari peserta meminta kesediaan daerah-daerah yang menginput namun belum 100% sehingga dapat mengisi instrument secara keseluruhan

G. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Beberapa kunci indikator sebuah Proper dianggap berhasil adalah:

1. Dukungan Mentor dalam bentuk pandangan mengenai arah kebijakan dan beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menyusun proyek perubahan.

2. Tim Efektif yang dibangun mampu dan memahami hal yang menjadi tujuan dari proyek perubahan.
3. Kemampuan Tim Efektif dan Dukungan Deputi dalam berkoordinasi dengan beberapa kecamatan lokasi prioritas sehingga bersedia menginput data yang telah ditentukan sebelumnya.
4. Persepsi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) untuk mengefektifkan pengelolaan infrastruktur pemerintahan di kawasan perbatasan melalui Si-Pintas.
5. Komitmen untuk menghasilkan Dokumen Perencanaan yang telah sesuai dengan arah strategis pembangunan sarana prasarana pemerintahan di kawasan perbatasan dan dapat dijadikan bahan masukan pembangunan untuk ditindaklanjuti oleh K/L teknis.

H. TATA KELOLA PROYEK PERUBAHAN

1. Pembentukan Tim Kerja

Merupakan tim yang membantu *Project Leader* dalam merealisasikan proyek perubahan mulai persiapan hingga tercapainya kemanfaatan proyek perubahan sesuai dengan tahapan *milestone* yang direncanakan. Tim kerja terbagi dalam 2 kelompok yakni:

- a. Tim Kelompok Kerja I disebut Kelompok Kerja Penerapan Teknologi dan Kompilasi Data.
- b. Tim Kelompok II disebut Kelompok Kerja Administrasi dan Dokumentasi.

Tabel 11. Daftar Nama Dan Tugas Tim Kerja

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	Dr. Drs Andi Muhammad Yusuf, M.Si	Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan	Proyek Leader	
2.	Ir. Ahmad Adli Harahap, M.Si	Perencana Ahli Madya	Ketua	KK. 1 & 2
3.	Wardah, SE, M.Si	Perencana Ahli Muda	Sekretaris	KK. 1 & 2
4.	Ahmad Zulfikar, S.STP	Perencana Ahli Muda	Anggota	KK. 1
5.	Dedy Yulianto, SE, MM	Perencana Ahli Muda	Anggota	KK.2
6.	Suryadi Yuska, S.STP	Fungsional Muda	Anggota	KK. 2
7.	Sartika Ismayani, S.STP	Fungsional Muda	Anggota	KK. 1
8.	Zea Khasanatul Ummah, A.P.Kb.N	Fungsional Muda	Anggota	KK. 1
9.	Reza Muhammad, S.IP	Staf	Anggota	KK. 1
10.	Moch Hasanuddin, A.md	Staf	Anggota	KK. 1

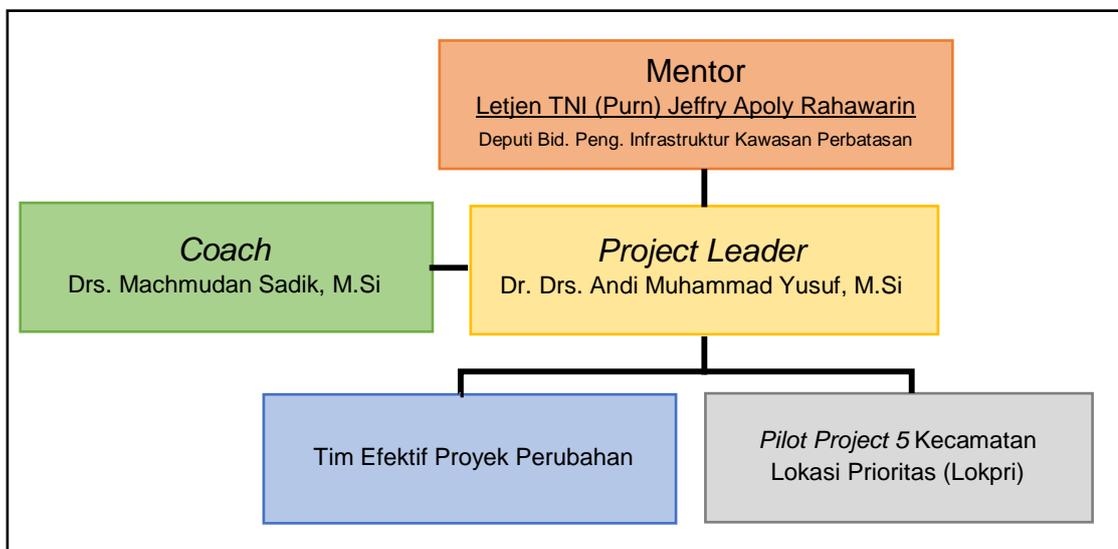
2. Struktur Organisasi Pelaksanan dan Tim Efektif

Gambar 4. SOTK Tim Efektif



3. Struktur Tata Kelola Proyek Perubahan

Gambar 5. SOTK Tata Kelola Proyek Perubahan



4. Tugas dan Kewenangan Tim Efektif

Adapun deskripsi dari masing-masing *stakeholders*:

Mentor bertindak sebagai pembimbing dan memberikan dukungan penuh pada *project leader* dalam menyelesaikan proyek perubahan dimaksud.

Coach membantu *Project Leader* dengan memberikan tambahan penjelasan yang diperlukan atas pertanyaan dan penyelenggaraan diklat.

Project Leader melakukan identifikasi dan koordinasi atas project perubahan.

Tim Efektif berkoordinasi dengan Kecamatan Lokpri yang menjadi *pilot project* project perubahan dalam pemenuhan data sarpras pemerintahan dan mengkompilasi data yang telah diinput oleh kecamatan lokpri.

Kecamatan Lokpri menginput data sarana prasarana pemerintahan sesuai dengan instrument yang telah di sepakati oleh *project leader* bersama mentor kedalam Si-Pintas.

5. Masa Berlaku dan Etika serta Mekanisme Efektif

Masa berlaku tim tersebut direncanakan sampai dengan Bulan Mei 2023 (Jangka Menengah) dan akan dilakukan evaluasi, efektif tidaknya untuk dipertimbangkan untuk dilakukan pembentukan tim jangka panjang.

Adapun etika yang perlu dipahami dengan adanya tim tersebut bagaimana mempertahankan saling percaya antara pihak-pihak terkait sehingga semua pihak dapat melakukan pekerjaan masing-masing dengan baik dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Dalam membentuk sebuah tim yang efektif perlu diperhatikan beberapa hal yakni, *Forming, Storming, Norming, Performing, Adjourning*.

6. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dimaksudkan sebagai upaya memantau pelaksanaan proyek perubahan Sistem Informasi Data Base Kecamatan Berbasis Web di Kawasan Perbatasan Negara. Sedangkan evaluasi dimaksudkan untuk melakukan kajian terhadap pelaksanaan proyek

perubahan jangka pendek. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh *Project Leader* dan anggota Tim Efektif Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan.

Adapun kegiatan meliputi:

- a. Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan.
- b. Koordinasi dan konsolidasi dengan *stakeholder*.
- c. Koordinasi bersama stakeholder.
- d. Sosialisasi Si-Pintas.
- e. Laporan monev uji coba Si-Pintas.

Metode yang digunakan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi adalah:

- a. Rapat Berkala Tim Efektif.
- b. Kunjungan lapangan.
- c. Komunikasi menggunakan percakapan *online* (WA Group).

I. RENCANA PENGEMBANGAN POTENSI DIRI SEBAGAI TINDAKLANJUT DARI SELF ASSESMENT DIRI

FORMULIR PESERTA			
Nama	:	Dr. Drs Andi Muhammad Yusuf, M.Si	
NIP	:	19730609 199311 1 002	
Jabatan	:	Asisten Deputi Infrastuktur Pemerintahan	
Instansi	:	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	
Program	:	PKN II	
Komponen	Sub Komponen	SKOR 1 - 10	
INTEGRITAS	1	Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan, aturan dan atau arahan yang diberikan di lingkup tugasnya dengan pendampingan atas resiko atau dampak yang timbul.	8
	2	Memastikan jajaran tim atau pegawai di lingkungan tugasnya untuk mampu konsisten menjalankan tugas serta fungsi dalam rangka mendukung proses bisnis organisasi.	9
	3	Mendorong terciptanya lingkungan kerja yang mampu secara konsisten menjaga perilaku kerja atau tindakan sesuai dengan kode etik atau peraturan yang berlaku.	9
	4	Membentuk iklim kerja di lingkup tugasnya yang memiliki kesadaran memberikan informasi secara objektif, konstruktif serta berasaskan kebenaran bagi kredibilitas organisasi.	9
	5	Memiliki prinsip yang kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh faktor internal maupun eksternal dalam rangka penerapan nilai, norma atau kode etik dalam bekerja.	9
	6	Membuat keputusan, mengantisipasi dampak keputusan serta meyiapkan tindakan penanganannya sebagai bentuk mitigasi resiko.	9
	JUMLAH		8,83
KERJASAMA	7	Membangun sinergi dan memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari unit kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi.	9
	8	Membangun kerjasama atau aliansi yang sinergis dengan pihak eksternal/ para pemangku kepentingan dalam rangka pencapaian target kerja organisasi.	7
	9	Menyampaikan informasi yang bersifat kompleks secara persuasive menggunakan metode tertentu untuk mendorong pemangku kepentingan sepakat pada langkah bersama dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan	8
	10	Mengetahui keberagaman kepentingan yang ada dalam bekerjasama dengan berbagai pihak, dan dapat mensinergikan keberagaman tersebut guna pencapaian target kerja organisasi.	8
	11	Membangun komitmen baik dalam unit atau antar unit kerja, dengan saling menghargai dan memberikan dukungan, guna menunjang pencapaian target kerja organisasi.	9
	JUMLAH		8,20
MENGELOLA PERUBAHAN	12	Mampu memonitor, mengevaluasi, memperhitungkan, dan mengantisipasi	9
	13	Memastikan perubahan sudah diterapkan secara aktif di lingkup unit kerjanya	7
	14	Menyusun program pengembangan kompetensi SDM dalam jangka panjang,	9
	15	Memantau, mengevaluasi hasil kerja unit serta melakukan perbaikan kinerja	8
	16	Menjadi <i>agent of change</i> yang menginisiasi perubahan secara terencana	8
	JUMLAH		8,20

FORMULIR MENTOR

Nama Peserta	: Dr. Drs. Andi Muhammad Yusuf, M.Si	Nama Mentor	: Letjen TNI (Purn) Jeffry Apoly Rahawarin
NIP	: 19730609 199311 1 002	NIP:	: XVI
Jabatan	: Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan	Jabatan	: Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan
Instansi	: Badan Nasional Pengelola Perbatasan	Instansi	: Badan Nasional Pengelola Perbatasan
Program	: PKN II		

Komponen	Sub Komponen	SKOR 1 - 10
INTEGRITAS	1 Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan, aturan dan atau arahan yang diberikan di lingkup tugasnya dengan pendampingan atas resiko atau dampak yang timbul.	9,6
	2 Memastikan jajaran tim atau pegawai di lingkungan tugasnya untuk mampu konsisten menjalankan tugas serta fungsi dalam rangka mendukung proses bisnis organisasi.	9,6
	3 Mendorong terciptanya lingkungan kerja yang mampu secara konsisten menjaga perilaku kerja atau tindakan sesuai dengan kode etik atau peraturan yang	9,8
	4 Membentuk iklim kerja di lingkup tugasnya yang memiliki kesadaran memberikan informasi secara objektif, konstruktif serta berasaskan kebenaran bagi kredibilitas organisasi.	9,8
	5 Memiliki prinsip yang kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh faktor internal maupun eksternal dalam rangka penerapan nilai, norma atau kode etik dalam bekerja.	9,8
	6 Membuat keputusan, mengantisipasi dampak keputusan serta meyiapkan tindakan penanganannya sebagai bentuk mitigasi resiko.	9,8
	JUMLAH	9,733
KERJASAMA	9 Menyampaikan informasi dengan cukup jelas baik secara tertulis maupun lisan dalam menunjang kelancaran kerja pada unit/tim yang dipimpinnya.	9,8
	10 Melakukan koordinasi yang efektif dengan pihak-pihak relevan di lingkup satuan kerja/organisasi dalam rangka menjamin kineja di lingkup unitnya.	9,8
	11 Aktif menjalin komunikasi dengan pemangku kepentingan eksternal organisasi dalam rangka menunjang kualitas layanan yang diselenggarakan organisasi.	9,6
	12 Merespon dengan positif adanya perbedaan atau kemajemukan dalam unit/tim kerja sehingga tetap fokus pada tujuan kerja yang disepakati.	9,6
	13 Bertanggungjawab terhadap peran atau tugasnya dalam rangka mencapai sasaran atau tujuan tim yang telah disepakati.	9,8
	JUMLAH	9,72
MENGELOLA PERUBAHAN	14 Aktif mencari informasi kebutuhan pemangku kepentingan dan memberikan penjelasan mengenai prosedur standar pelayanan yang berlaku sebagai upaya pemenuhan pelayanan publik yang efektif dan efisien.	9,6
	15 Aktif mengembangkan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan dalam pemberian pelayanan publik.	9,8
	16 Menggunakan cara yang beragam untuk memastikan bawahan memahami arahan penyelesaian tugas yang sesuai dengan target kerja yang diberikan dan SOP yang berlaku	9,6
	17 Mencari metode kerja alternatif yang lebih efektif untuk menyelesaikan pekerjaan terutama ketika menghadapi hambatan	9,6
	18 Proaktif mencari peluang perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemberian pelayan publik.	9,8
	JUMLAH	9,68

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA

Nama Peserta	: Dr. Drs Andi Muhammad Yusuf, M.Si	Nama Mentor	: Letjen TNI (Purn) Jeffry Apoly Rahawarin
NIP	: 19730609 199311 1 002	NIP:	: XVI
Jabatan	: Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan	Jabatan	: Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan
Instansi	: Badan Nasional Pengelola Perbatasan	Instansi	: Badan Nasional Pengelola Perbatasan
Program	: PKN II		

	Nilai Komponen				Kualifikasi Total Sub Komponen
	Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan	Rata-Rata Total Sub Komponen	
Peserta	8,83	8,20	8,20	8,41	Baik
Mentor	9,73	9,72	9,68	9,71	Istimewa
Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen	9,46	9,26	9,24	9,32	Istimewa
Kualifikasi Per Sub Komponen	Istimewa	Istimewa	Istimewa	Istimewa	

Keterangan Kualifikasi		Akhir Sikap Perilaku
9.00-10	Istimewa	9,32
7-8.99	Baik	
5-6.99	Cukup	Kualifikasi: Istimewa
3-4.99	Kurang	
1-2.99	Sangat Kurang	

REKOMENDASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI:	
Istimewa	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan sebagai bekal pengayaan sikap perilaku untuk menduduki jabatan pimpinan yang lebih tinggi
Baik	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal pendalaman sikap perilaku dalam JPT Pratama
Cukup	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki JPT Pratama
Kurang	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta
Sangat Kurang	: perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan, pendampingan yang sangat ketat dan sebaiknya agar melibatkan unit pengelola kepegawaian instansi asal peserta sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki JPT Pratama

BAB II

PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

A. CAPAIAN TAHAPAN RENCANA STRATEGIS

1. CAPAIAN RENCANA JANGKA PENDEK

Target capaian rencana jangka pendek Proyek Perubahan dapat dicapai sebagaimana disajikan pada tabel 12.

Tabel 12. Ringkasan/Overview Pelaksanaan dan Capaian
Proyek Perubahan

NO	KEGIATAN UTAMA	RENCANA	REALISASI		BUKTI
a.	Pembentukan Tim Efektif, dan Penyusunan Instrumen	Minggu IV September 2022	▪ Penyusunan ST & SK	21 Sep 2022	▪ SK Kepala BNPP ▪ ST Asisten Deputi
			Penandatanganan ST	22 Sep 2022	▪ ST Asisten Deputi
			Rapat Internal Tim	28 Sep 2022	▪ Notulensi ▪ Foto
			Penyusunan Instrumen	4 Okt 2022	▪ Notulensi ▪ Foto
			Pembahasan Instrumen	5 Okt 2022	▪ Notulensi ▪ Foto
			Penandatanganan SK ttg Penggunaan Sistem Informasi Kecamatan berbasis WEB	2 Des 2022	▪ SK Kepala BNPP

b.	Rapat Eksternal bersama Kementerian/Lembaga	Minggu V September 2022	Rapat dalam rangka penyusunan basis data	25 Okt 2022	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Surat Undangan ▪ Notulensi ▪ Foto
c.	Pembahasan dan Penginputan Instrument Sistem Informasi berbasis WEB	Minggu IV Oktober 2022	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Input Instrument ▪ Uji Coba Sistem 	2 Nov 2022	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Notulensi ▪ Foto Kegiatan ▪ Foto Aplikasi ▪ Panduan Penggunaan
d.	Melaksanakan Virtual Meeting bersama Kecamatan	Minggu V Oktober 2022		29 Nov 2022	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Surat Undangan ▪ Notulensi ▪ Virtual Background
e.	Melaksanakan Evaluasi Sistem Informasi berbasis WEB	Minggu IV-V November 2022		29 Nov 2022	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Notulensi ▪ Aplikasi

2. PELAKSANAAN CAPAIAN JANGKA PENDEK

a. Pembentukan Tim Efektif dan Penyusunan Instrumen

Kegiatan dalam sub tahapan ini adalah kegiatan awal dari pelaksanaan Proyek Perubahan, dimana kegiatan yang dilakukan dimulai dengan Penyusunan dan Penandatanganan ST yang kemudian dilanjutkan dengan Rapat Internal/konsolidasi dengan tim di Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan untuk dapat mengetahui tugas dan perannya dalam Tim Efektif yang akan mendukung pelaksanaan Proyek Perubahan. Output dari Sub tahapan 1 ini adalah Surat Tugas Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan Nomor: 1334111/DIII.AIII/VII/2022, tanggal 22 September 2022, untuk membentuk tim efektif proyek perubahan sistem informasi data base kecamatan berbasis WEB di Kawasan Perbatasan Negara BNPP Tahun 2022. Berikut bukti dukungnya :



Rapat Internal Awal bersama Tim Efektif (28 September 2022)

Setelah dilakukan rapat bersama, dengan harapan tim Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan BNPP mengetahui tugas, maksud dan tujuan proyek perubahan. Tim leader melakukan pengumpulan gagasan serta ide-ide (*brainstorming*)/ instrument yang akan ditampilkan dalam sistem informasi berbasis web yang akan dijadikan intervensi pembangunan di kawasan perbatasan. Berikut bukti dukungunya:



Rapat Penyusunan dan Pembahasan Instrument proyek perubahan di pimpin oleh Tim Leader (5 Oktober 2022)

b. Terpenuhinya Dukungan dari *Stakeholder* Internal dan Eksternal

Kegiatan dalam sub tahapan ini adalah kegiatan taking ownership yang dilakukan dalam rangka membangun komitmen bersama dengan sejumlah pemangku kepentingan untuk melaksanakan perubahan terkait dengan area kegiatan unit organisasi. Output dari Sub tahapan ini adalah Surat Keputusan Kepala BNPP tentang Penggunaan Sistem Informasi Base Data Kecamatan Berbasis WEB di Kawasan Perbatasan Negara (Legal Draft) dan Video Dukungan Proyek Perubahan oleh Kementerian/Lembaga Mitra Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan. Berikut bukti dukungannya:



Dukungan Mentor Link Video: <https://bit.ly/3VxJvM4>



Video Dukungan Eksternal oleh Direktur Waskoban
Ditjen Bina Adwil Kemendagri *Link video:* <https://bit.ly/3UpBOpT>

c. Rapat Eksternal bersama Kementerian/Lembaga

Kegiatan dalam sub tahapan 3 ini adalah kegiatan membangun persepsi pemantauan pengelolaan infrastruktur pemerintahan di kawasan perbatasan khususnya mengenai sarana prasarana pemerintahan melalui base data berbasis WEB. *Project Leader* mengundang Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dan Biro Perencanaan Kemendagri untuk melakukan pemetaan daerah-daerah yang dapat dijadikan representasi kawasan perbatasan negara pada umumnya mengingat waktu pelaksanaan proyek perubahan yang terbatas serta Instrument penilaian. Output dari Sub tahapan 3 ini adalah Surat Undangan Deputy Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan No.IKP.93.01/2619/X/2022, tanggal 21 Oktober 2022, hal Undangan. Berikut bukti dukungnya:





Rapat Eksternal bersama Kemendagri Setjen dan Ditjen Bina Adwil
(25 Oktober 2022)

d. Pembahasan dan Penginputan Instrument kedalam Sistem Informasi Data Base Kecamatan Berbasis WEB

Kegiatan dalam sub tahapan ini adalah konsolidasi tim efektif bersama tim pengolah database berbasis WEB dan Bagian Data Informasi BNPP membahas ketersediaan server dan finalisasi instrument yang menjadi penilaian masing-masing kecamatan serta memastikan aplikasi siap digunakan oleh daerah untuk melakukan input data pada saat pertemuan bersama daerah. Output dari tahapan ini adalah Notulensi dan *Capture Layout* Aplikasi. Berikut bukti dukungnya:



Rapat Internal BNPP dan Tim Pengolah Data (2 November 2022)

e. Melaksanakan *Virtual Meeting* bersama Kecamatan

Kegiatan dalam sub tahapan ini dilaksanakan secara *virtual meeting* bersama kecamatan yang menjadi representasi daerah perbatasan yaitu:

- 1) Kec. Sukajaya Kota Sabang Prov. Aceh;
- 2) Kec. Subi Kab. Natuna, Prov. Kep. Riau;
- 3) Kec. Sajingan Besar, Kab. Sambas, Prov. Kalimantan Barat;
- 4) Kec. Dako Pamean, Kab. Tolitoli, Sulawesi Tengah; dan
- 5) Kec. Melonguane, Kab. Talaud, Prov. Sulawesi Utara.

Selain 5 Kecamatan tersebut pada saat pelaksanaan *virtual meeting* Kec. Tolitoli Utara Kab. Tolitoli Prov. Sulawesi Tengah bergabung dan mengikuti kegiatan hingga akhir dan melakukan ujicoba dan input data sarana prasarana pemerintahan masing-masing serta diinformasikan secara umum perihal proyek perubahan termasuk kegiatan, tujuan, output serta *outcome*, dimana dengan adanya proyek perubahan efisiensi dan efektif dengan data yang telah diinput dapat dilakukan intervensi pembangunan yang tepat khususnya di kawasan perbatasan negara oleh BNPP melalui Kementerian/Lembaga Teknis. Adapun instrument yang menjadi tolak ukur

pelayanan pemerintahan dalam sistem informasi berbasis Web ini yaitu, Kondisi Sarana Prasarana Pemerintahan, SDM Aparatur, Layanan Dukungan Pemerintahan, Koordinat Kantor, dan Tamabahan Dokumen Output dari sub tahapan ini adalah Surat Undangan Deputy Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan No. IKP.93.07/1172/XI/2022, hal Undangan. Berikut bukti dukungnya:



Rapat melalui *Virtual Meeting* bersama Kecamatan Lokasi Prioritas (29 November 2022) Link Video: <https://bit.ly/3h0Wxmr>

f. Melaksanakan Evaluasi Sistem Informasi Data Base berbasis WEB

Kegiatan dalam sub tahapan ini adalah masukan dari masing-masing kecamatan setelah dilakukannya pertemuan bersama melalui *virtual meeting*, adapun beberapa yang perlu ditindaklanjuti segera dan masukan yang akan dilanjutkan pada milestone jangka menengah dan panjang. Output dari sub tahapan ini adalah Capture Aplikasi dan Notulen.

3. HASIL PELAKSANAAN RENCANA JANGKA PENDEK

Hasil pelaksanaan rencana jangka pendek selengkapnya disajikan sebagai berikut:

- a. Sistem Informasi Data Base Kecamatan Berbasis WEB di Kawasan Perbatasan Negara.
- b. Bahan masukan/Intervensi Pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara di 6 Kecamatan Lokasi Prioritas.

B. IMPLEMENTASI STRATEGI MARKETING

Keberhasilan implementasi Proyek Perubahan pada jangka pendek tidak terlepas dari peran penting stakeholders diantaranya penggunaan bauran pemasaran (marketing mix) yang telah ditetapkan sebelumnya. Diantara elemen marketing mix (4P + C) tersebut price dan promotion perlu mendapatkan catatan khusus. Terkait dengan price, keberhasilan menganggarkan kegiatan ini pada program TA 2022 menjadi jalan kelanjutan bagi implementasi Proyek perubahan ini. Selanjutnya terkait dengan promotion, komunikasi yang intensif dan terukur dengan stakeholder baik dalam penunjukan Tim Efektif serta pelibatan beberapa stakeholders secara khusus dalam diskusi dapat menghasilkan beberapa milestone dalam jangka pendek. Strategi ini untuk mendukung keberhasilan pemasaran proyek.

1. STRATEGI KOMUNIKASI

Untuk menghadapi setiap jenis stakeholder di atas, reformer/ project leader akan menggunakan strategi komunikasi. Adapun peta strategi komunikasi yang disusun adalah sebagai berikut.

Tabel 13. Peta Strategi Komunikasi dalam Implementasi Pelaksanaan Target Kegiatan Proker

KEEP SATISFIED	MANAGE CLOSELY
<p>Strategi komunikasi yang digunakan adalah untuk meningkatkan pengaruh <i>stakeholders</i> agar mendukung proyek perubahan yaitu dengan konsultasi dan diskusi.</p> <p>Dalam hal pelaksanaan target Proyek Perubahan dengan <i>pilot project</i> 5 Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri), agar tidak meleset dari jadwal yang telah ditetapkan, <i>Project Leader</i> secara terus menerus berkonsultasi dengan Deputi dan stakeholder yang mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, diantaranya TU Sekretaris Utama sehingga pelaksanaan proper tidak bersamaan dengan agenda BNPP, maupun Tim Efektif</p>	<p>Strategi komunikasi yang digunakan adalah yang akan meningkatkan dukungan dan minat promotors terhadap proyek perubahan ini (<i>closely managed strategy</i>), diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Konsultasi; ▪ Diskusi secara reguler; ▪ Melaporkan progres kegiatan dan ▪ Mengidentifikasi hambatan terhadap proyek perubahan.
MINIMAL EFFORT	KEEP INFORMED
<p>Untuk melaksanakan target kegiatan Proyek Perubahan ini <i>Project Leader</i> selalu melibatkan stakeholder internal maupun eksternal, sehingga komunikasi dan koordinasi selalu terjalin dan sinergis. Langkah ini diambil oleh <i>Project Leader</i> agar proses berbagi pengalaman, saling edukasi dan Proper kedepannya dapat bermanfaat bagi masing-masing instansi di kawasan perbatasan.</p>	<p>Strategi komunikasi yang digunakan adalah untuk meningkatkan minat stakeholder terhadap proyek perubahan yaitu dengan konsultasi dan diskusi penerapan Si-Pintas.</p>

2. STRATEGI MARKETING HASIL PROYEK PERUBAHAN

Strategi marketing mix terhadap hasil proyek perubahan dilakukan dengan memperhatikan elemen pemasaran sektor publik, yaitu: 4P 1C (Product, Price, Place, Promotion dan Customer,).

a. *Product*

Product yang dihasilkan dari proyek perubahan ini adalah: 1) Sistem Informasi Base Data Kecamatan berbasis WEB; dan 2) Bahan Masukan Pembangunan di Kawasan Perbatasan yang tepat sasaran.

b. *Price*

Harga dari pelaksanaan proyek perubahan ini adalah Priceless, produk ini tidak berbayar dengan mengoptimalkan tim internal dan menyesuaikan dengan kebutuhan Kementerian/Lembaga Teknis.

c. *Place*

Tempat untuk memasarkan proyek perubahan ini adalah melalui media whatsapp grup camat perbatasan dan forum-forum yang dilaksanakan oleh Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan.

d. *Promotion*

Proyek perubahan ini didukung oleh Sekretaris Utama BNPP, Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, Kementerian Dalam Negeri, dan Camat Kawasan Perbatasan. Dalam berbagai forum rapat koordinasi BNPP proyek perubahan ini akan dilanjutkan dengan target di 216 Kecamatan Lokasi Prioritas Kawasan Perbatasan dan 564 Kecamatan Perbatasan.

e. *Customer*

Sasaran utama sebagai customer yang akan menggunakan produk jangka pendek ini adalah: Kecamatan Sukajaya, Subi, Sajingan Besar, Dako Pamean, Tolitoli Utara dan Melonguane.

C. PEMBERDAYAAN ORGANISASI PEMBELAJARAN

Project leader berupaya mendialogkan substansi materi dengan para pihak yaitu:

1. Penerapan pendekatan organisasi pembelajaran dilaksanakan terhadap seluruh tahapan jangka pendek proyek perubahan.

2. *Project Leader* menanamkan dalam diri setiap ASN di BNPP pada UKE II Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan bahwa proyek perubahan ini sebuah bentuk komitmen pemerintah untuk membangun perbatasan negara kearah yang lebih baik melalui sistem yang memiliki akurat data yang tinggi. Sehingga dibutuhkan sikap yang sama oleh pemerintah pusat.
3. Proyek perubahan ini merupakan strategi peningkatan capaian pembangunan infrastruktur daerah dengan menggalang dukungan dan partisipasi berbagai stakeholders sehingga terbangun pembangunan yang sinergis.
4. Partisipasi, sinergi, dan kolaborasi stakeholders merupakan pendorong agar pembangunan infrastruktur daerah dapat bergerak cepat dan pemerintah daerah bersinergi dengan berbagai pihak dalam bentuk Penta helix.

BAB III

PENUTUP

A. LESSONT LEARNED

Beberapa pembelajaran yang dapat diambil dari proses pengerjaan proyek perubahan ini diantaranya adalah:

1. Support pimpinan hal yang sangat penting untuk menentukan keberlanjutan Proyek Perubahan.
2. Inovasi sangat perlu diterapkan dan ditingkatkan untuk membiasakan organisasi agar adaptif terhadap perubahan.
3. Kerjasama, kolaborasi dan koordinasi baik dengan stakeholder internal maupun eksternal sangat diperlukan karena pada saat perancangan dan pelaksanaan kita tidak dapat berjalan sendiri.
4. Komunikasi yang baik merupakan kunci untuk mendapatkan dukungan serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi.
5. Diperlukan penanganan PPKT secara holistik & terintegrasi melalui pemberdayaan PPKT secara berdaya & berhasil guna menjaga tetap tegak & kokohnya keutuhan wilayah kedaulatan NKRI.

B. KESIMPULAN

1. Pembangunan di kawasan perbatasan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan pemerintah melalui sebuah Sistem Informasi Berbasis Web di era 4.0.
2. Keberhasilan implementasi Proyek Perubahan pada jangka pendek tidak terlepas dari peran penting stakeholders yang terlibat langsung maupun tidak langsung.
3. Partisipasi, sinergi, dan kolaborasi stakeholders merupakan pendorong agar pembangunan infrastruktur daerah dapat bergerak cepat.

C. SARAN/REKOMENDASI

1. Sistem Informasi ini diharapkan dapat diimplementasikan di seluruh kecamatan perbatasan.

2. Kementerian/Lembaga terkait lainnya turut mengambil peran dalam memajukan pembangunan di kawasan perbatasan dengan dukungan sistem informasi yang lebih komprehensif.
3. Perlu kolaborasi dan koordinasi yang intensif dengan semua stakeholders Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal/Literatur:

1. Handrian, Eko, dkk. (2020). *Penguatan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan di Kabupaten Kepulauan Meranti*. Jurnal Kemunting Vol.1 Nomor 2.
2. Yurianto, dkk. (2019). *Analisis Strategi Pemberdayaan Ekonomi Dengan Pendekatan USG dan SWOT*. Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Vol. 3, No. 2.
3. Bangun, Budi Hermawan. (2016). *Konsepsi dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan*
4. *Negara: Perspektif Hukum Internasional*. Jurnal Hukum Tanjungpura, Vol. 1, Issue, 1.

Peraturan:

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
3. Perpres nomor 44 Tahun 2017 Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
4. Perpres nomor 118 Tahun 2022 Tentang Rencana Induk Pengelolaan BWN-KP Tahun 2020-2024.
5. Perkaban BNPP Tentang Rencana Strategis Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2020-2024.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR PRIBADI



1. Nama Lengkap : Dr. Drs. H. Andi Muhammad Yusuf Machmud, M.Si
2. Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 9 Juni 1973
3. Alamat : Kebon Kacang, RT 3, RW 4, Jakarta Pusat
4. Jenis Kelamin : Pria
5. Agama : Islam
6. Telepon : 0823 4362 2263
7. Email : machmudyusuf5@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. D-4 Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (Jatinagor Bandung)
2. S-1 Institut Ilmu Pemerintahan (Jakarta)
3. S-2 Universitas Hasanuddin (Makassar)
4. S-3 Universitas Padjajaran (Bandung)

RIWAYAT KARIR

1. Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan (2019-sekarang).
2. Kepala Subdit Pemantauan Orang Asing & Lembaga Asing, Direktorat Kewaspadaan Nasional, Ditjen Polpum Kemendagri (2019).
3. Kepala Seksi Bantuan Keuangan Partai Politik, Direktorat Politik Dalam Negeri, Ditjen Polpum Kemendagri (2018).

LAMPIRAN

1. Lampiran Lampiran Foto dan Video



2. Lampiran Undangan, Notulensi dan Surat Tugas

